

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang

Dewasa ini dalam persaingan bisnis yang semakin tinggi di era digital, adanya konservatisme akuntansi menjadi salah satu prinsip fundamental dalam pelaporan keuangan. Prinsip ini mengindikasikan adanya pengakuan kerugian dengan cepat dan perlakuan laba yang lebih hati-hati di perusahaan. Dengan demikian, diharapkan adanya kualitas informasi yang diterima para pemangku kepentingan dapat terjaga dan lebih dapat dipercaya (M. Khan & Watts, 2009). Penerapan konservatisme akuntansi tidak menjadi objek yang berdiri sendiri, melainkan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal perusahaan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, *Leverage* ukuran ini dapat menggambarkan sejauh mana perusahaan bergantung pada utang untuk membiayai operasional kegiatan usahanya (Armanious & Zhao, 2024a). *Profitability* dinilai dapat menunjukkan bagaimana kemampuan perusahaan menghasilkan laba secara konsisten yang dihitung pada standar ROA atau ROE (Biddle et al., 2020). Selain itu, adanya tanggung jawab sosial dalam perusahaan yang diantaranya diwujudkan melalui *Sustainability Report* sebagai laporan nyata yang di munculkan perusahaan mencerminkan komitmen perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat, yang dapat memengaruhi cara perusahaan menyusun laporan keuangan (Subroto et al., 2020). Adapun hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan konservatisme akuntansi tidak selalu bersifat langsung. Struktur kepemilikan, khususnya

kepemilikan negara, berpotensi memoderasi hubungan tersebut. Status kepemilikan negara pada perusahaan yang terindikasi dimiliki sebagian besar sahamnya oleh BUMN, sering menimbulkan pengawasan yang lebih ketat dibandingkan dengan perusahaan NON-BUMN (Burke et al., 2020).

Maraknya kasus yang mencerminkan keterbalikan konservatisme keuangan di Indonesia masih tergolong rendah, dikarenakan banyak pembuktian adanya kasus ketidak-hati-hatian perusahaan dalam melaporkan keuangannya. Kasus dialami oleh PT Bank MNC Internasional Tbk yang pada 2022 lalu dikenai sanksi oleh OJK dikarenakan membuat overvaluation pada portofolio laporan investasi selama periode COVID-19. Hal ini menjadikan perbankan swasta tersebut didenda sebesar 10 miliar rupiah. Dalam kondisi tersebut konservatisme akuntansi menjadi aspek yang penting untuk dibahas. Kondisi tersebut membuat pelaporan keuangan menjadi tidak konservatis dan menimbulkan pertanyaan serta persepsi investor (Infobanknews, 2025; Kontan, 2024).

Kasus yang serupa juga terjadi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tahun yang sama. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri dan PPAATK mengungkapkan adanya sindikat pembobolan rekening dorman bank BUMN di Jawa Barat dengan nilai kerugian mencapai Rp204 miliar. Dalam kasus ini pelaku melakukan pencucian uang yang didasarkan pada motif pemindahan dana rekening dormant untuk dialokasikan ke rekening investasi ilegal. Aksi ini sangat bergantung pada celah pengawasan

terhadap pengelolaan rekening dormant di perbankan (PPATK, 2024). Kedua kondisi ini sangat penting bagi kita dalam mengkritisi peran perbankan BUMN maupun NON-BUMN dalam tanggung jawab pelaporan keuangan dan tanggung jawab dalam memberikan keamanan pada nasabah, investor, dan masyarakat luas.

Maraknya ketidakhati-hatian dalam pelaporan keuangan perbankan di Indonesia memunculkan kekhawatiran baru ketika pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun melalui bank-bank Hibrida. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap sektor perbankan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi menegaskan bahwa apabila penyerapan dana tidak optimal, pemerintah akan mempertimbangkan pengalihan ke bank lain sebagai langkah penyesuaian kebijakan (Media Indonesia, 2025). Di sisi lain, Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menilai bahwa dana sebesar itu memerlukan pengawasan yang ketat karena berisiko menimbulkan moral hazard dan konflik kepentingan jika tidak dikelola dengan benar. Ia juga mengingatkan bahwa kasus Jiwasraya dan Asabri menjadi pelajaran penting mengenai lemahnya tata kelola lembaga keuangan negara. Meski demikian, tambahan dana tersebut secara teoritis berpotensi mendorong penciptaan lapangan kerja, khususnya jika diarahkan ke sektor industri padat karya (SINDOnews, 2025).

Dalam implikasi negatif di sisi inflasi, pembiayaan fiskal melalui utang publik atau penciptaan uang untuk mendukung bank milik negara terbukti meningkatkan tekanan inflasi, terutama jika stimulus fiskal tidak diimbangi dengan kebijakan moneter yang ketat (Bacchiocchi et al., 2024; Olaoye et al., 2024). Pengaruh keputusan negara dalam mendorong Repeated capital infusions (injeksi modal berulang) ke bank milik negara dapat menciptakan moral hazard, mendorong perilaku pengambilan risiko berlebihan oleh bank, dan pada akhirnya meningkatkan risiko fiskal serta instabilitas keuangan (Marisetty & Moturi, 2023). Intervensi pemerintah dan kebijakan permodalan bank terbukti meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat daya saing lembaga keuangan, terutama melalui ekspansi kredit ke sektor produktif ketika kecukupan modal ditingkatkan (Subramanyam, 2020:125–126). Penguatan permodalan juga berperan dalam memperbaiki tata kelola dan meminimalkan perilaku oportunistik, termasuk manipulasi leverage yang dapat meningkatkan risiko kebangkrutan (Kieso et al., 2019:215–216). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa regulasi modal dan keterlibatan pemerintah mampu menurunkan risiko finansial serta meningkatkan stabilitas sistem keuangan (Bednarek et al., 2023).

Pada Penerapannya adanya transparansi dalam pelaporan publik memegang peran penting dalam membangun akuntabilitas, karena memungkinkan masyarakat untuk menilai bagaimana dana publik digunakan serta menilai kualitas keputusan fiskal yang diambil pemerintah (OECD, 2024:27–28). Masyarakat memiliki hak dalam mengetahui adanya transparansi

yang dilakukan oleh perusahaan publik utamanya adalah perbankan. Hal ini dikarenakan pengungkapan dana publik dapat menjadi implikasi untuk menilai kualitas pada keputusan sektor fiskal yang disokong oleh pemerintah (OECD, 2024:27–28). Pelaporan keuangan yang dilakukan secara objektif dan akuntabel menjadi sebuah fondasi yang krusial. Melalui sistem pelaporan yang baik, diharapkan adanya penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan dapat (Warren et al., 2018:355–356). Jika dilihat secara lebih menyeluruh, terdapat berbagai dampak positif dan negatif dari dukungan pendanaan pemerintah serta maraknya pelanggaran prinsip kehati-hatian menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi memegang peran penting dalam menjaga kredibilitas laporan keuangan, kepercayaan investor, dan stabilitas sistem keuangan. Tanpa penerapan konservatisme yang konsisten, laporan keuangan mudah dimanipulasi, risiko sistemik meningkat, dan reputasi perbankan dapat terancam. Karena itu, pengawasan OJK beserta penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) perlu terus diperkuat sebagai respons terhadap dinamika industri keuangan modern (OJK Annual Report 2022)

Penelitian ini akan menampilkan sebuah kajian ilmiah dengan sebuah kritisi yang terstruktur, bahwa bagaimana seharusnya masyarakat dapat menilai sektor fiskal di Indonesia yang diimplikasikan dalam perbankan. Selain itu penelitian ini akan menguji secara khusus bagaimana peran negara dalam memperlemah atau menguatkan implikasi antara *sustainability report*, leverage, dan profitability terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian lintas

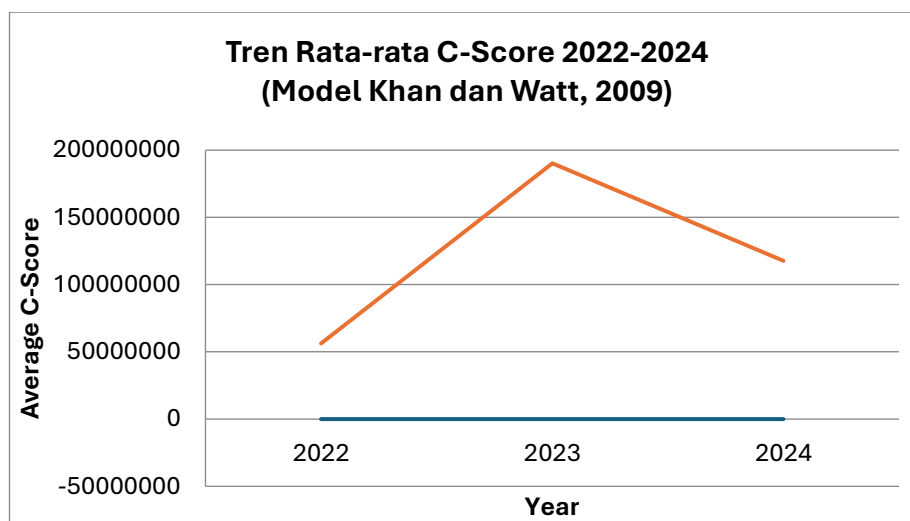
negara sebelumnya terdapat inkonsistensi yang menunjukkan hasil beragam. Studi menyatakan bahwa CSR, yang dalam penelitian ini dikatakan sebagai *sustainability report* akan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Shen 2020 mengatakan pada penelitiannya, bahwa Perusahaan yang berperan secara aktif dalam melaksanakan tanggung jawab sosial biasanya lebih berhati-hati dalam mengakui laba demi menjaga reputasi dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan publik (X. Shen et al., 2020). Namun, hasil berbeda pada penelitian di Amerika Serikat, perusahaan dengan kinerja CSR yang lebih tinggi justru menunjukkan tingkat konservatisme rendah. Hal ini terjadi karena CSR dinilai mampu meningkatkan transparansi dan menurunkan asimetri informasi, sehingga dorongan untuk menyajikan laporan keuangan konservatif menjadi berkurang (Burke et al., 2020). Inkonsistensi temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh *Sustainability Report* terhadap konservatisme akuntansi sangat dipengaruhi oleh konteks kelembagaan serta struktur kepemilikan perusahaan, sehingga penting untuk meninjau kembali peran kepemilikan negara dalam hubungan tersebut.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa adanya hubungan di antara leverage dan konservatisme akuntansi menghasilkan hasil yang cukup beragam. Diantaranya, perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan cenderung mengurangi penerapan konservatisme karena manajer ingin menampilkan kinerja keuangan yang tampak lebih baik di hadapan kreditor (Phuong Hong & Tra My, 2024). Temuan serupa juga diperlihatkan oleh Aldoseri et al. (2022), yang menjelaskan bahwa semakin besar tekanan utang,

semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan secara hati-hati (Aldoseri et al., 2022).

Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Dai dan Ngo (2021) dalam penelitiannya, leverage terbukti dapat meningkatkan adanya penerapan konservatisme akuntansi. Dalam konteks ini, perusahaan dengan utang yang tinggi akan memenuhi ekspektasi kreditor melalui pelaporan yang konservatif agar dianggap mampu dalam mengelola risiko keuangan dan demi menjaga kepercayaan pemberi pinjaman (Dai & Ngo, 2021). Di Indonesia, penelitian Solichah (2020) menemukan hasil yang berbeda dari sebelumnya, penelitian ini menilai adanya yang leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi (Solichah, 2020). Studi ini menilai adanya faktor-faktor diluar itu seperti ukuran perusahaan dan tingkat *profitability* lebih dominan memengaruhi kebijakan pelaporan keuangan (Solichah, 2020).

Inkonsistensi temuan tersebut juga tampak pada adanya pengaruh variabel *profitability*. Dalam beberapa penelitian terdahulu, pada perusahaan dengan *profitability* yang tinggi akan cenderung menerapkan konservatisme untuk menjadikan strategi dalam menjaga stabilitas laba serta mempertahankan kepercayaan investor (Casciello et al., 2025). Namun, studi lain menunjukkan arah yang terlihat berbeda, penelitian oleh (Olmo et al., 2021) menemukan bahwa adanya *profitability* yang tinggi justru dapat mendorong manajemen perusahaan untuk dapat menyajikan sajian laporan laba secara lebih optimistis, sehingga tingkat konservatisme menjadi lebih rendah.



**Gambar 1.1 Tren Rata-rata C-Score 2022-2024 (Khan dan Watt, 2009)**

Sumber : Olah data penulis (2025)

Berdasarkan hasil perhitungan konservatisme akuntansi menggunakan model Khan dan Watts (2013) terhadap 42 data laporan keuangan perbankan selama periode 2022–2024, diperoleh adanya tren rata-rata untuk pengukuran *C-Score* yang menunjukkan terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan penurunan kembali pada tahun 2024. Secara keseluruhan, tren ini akan berimplikasi sejalan dengan teori Khan dan Watts (2009) yang menyatakan bahwa konservatisme akuntansi dapat bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh tingkat risiko dan kondisi pasar (M. Khan & Watts, 2009).

Faktor negara sebagai variabel moderasi dari sebuah konservatisme akuntansi sering menjadi celah yang menarik untuk diteliti dalam penelitian yang ada di berbagai negara. Di antaranya penelitian yang dilakukan di Rusia (Garanina & Kim, 2023b), yang secara khusus meneliti peran kepemilikan negara dalam memoderasi hubungan antara

pengungkapan *Sustainability report* dan konservatisme akuntansi. Studi yang terjadi di Indonesia kepemilikan negara (BUMN) sebagai variabel moderasi dari pengaruh CSR terhadap konservatisme akuntansi yang memanfaatkan sektor manufaktur (Ikma & Syafruddin, 2019). Sementara itu, Vietnam (Le & Moore, 2021) berfokus pada efek gabungan dari kepemilikan negara dan kebijakan pemotongan tarif pajak terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian pada perusahaan Tiongkok menemukan bahwa mekanisme Tata Kelola Perusahaan (CG), yang diukur dengan rasio direktur independen, kepemilikan institusional, dan entitas milik negara, ditemukan memoderasi (memperkuat) hubungan antara manajemen laba dan konservatisme akuntansi (Xi & Xiao, 2022a)

Model analisis data berdasarkan keterbatasan yang diidentifikasi pada model Basu (1997), banyak studi yang menyarankan penelitian selanjutnya untuk beralih sepenuhnya menggunakan model *Conditional Conservatism Score (C-Score)* oleh Khan dan Watts (2009). Hal ini sejalan dengan temuan (Dietrich, Muller, dan Riedl; 2023) yang secara tegas menunjukkan bahwa model ATM Basu (1997) memiliki tiga bias struktural signifikan, yang jika dikoreksi, dapat menghilangkan temuan empiris yang selama ini diterima. Saran ini juga didukung oleh perbandingan yang dilakukan oleh (Farhangdoust & Sayadi, 2020), yang menyiratkan bahwa *C-Score* adalah alat ukur yang lebih komprehensif.

Model C-Score banyak dipilih sebagai dasar untuk mengukur konservatisme akuntansi karena kemampuannya dapat menggambarkan praktik konservatisme modern yang berkembang dalam akuntansi modern (Khan dan Watts, 2009). Model ini banyak digunakan dalam penelitian di berbagai negara. Penelitian di Indonesia, yang dilakukan oleh Dhafi Rahmatul Ikma dan Syafruddin menggunakan C-Score sebagai alat untuk mengkaji hubungan CSR dan kepemilikan negara pada perusahaan manufaktur (Ikma & Syafruddin, 2019). Penggunaan ukuran ini menjadi diperluas, dalam studi di Rusia yang melihat adanya pengaruh CSR terhadap konservatisme akuntansi, penelitian ini memasukkan kepemilikan negara sebagai variabel moderasi (Garanina & Kim, 2023) dan analisis tata kelola global terkait *cross-listing* (Mrad, 2022).

Berdasarkan kesenjangan dari penelitian tersebut, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) dalam aspek. Aspek pertama adalah penelitian ini akan secara spesifik menguji gabungan pengaruh CSR, *leverage*, dan *Profitability* terhadap konservatisme akuntansi dengan kepemilikan negara sebagai variabel moderasi, yang sebelumnya kepemilikan negara sebagai moderasi belum banyak dikaji dalam konteks perbankan Indonesia. Penelitian ini menggunakan alat ukur *C-Score* yang dikembangkan oleh Khan dan Watts (2009), sebagai ukuran konservatisme akuntansi yang lebih representatif dibandingkan pendekatan tradisional berbasis akrual dengan fokus pada periode pascapandemi 2022-2024. Penelitian ini juga memberikan kontribusi empiris baru untuk menjelaskan apakah intervensi dan kepemilikan negara pada bank BUMN benar-benar mendorong praktik pelaporan keuangan yang lebih

konservatif atau justru sebaliknya. Aspek yang ketiga, adalah penelitian ini khusus meneliti sektor perbankan yang ada di Indonesia, dimana hal ini menjadi *gap* penelitian sebelumnya yang banyak meneliti sektor manufaktur di Thailand, Vietnam, China, Rusia dan Indonesia.

Penelitian ini akan difokuskan pada sektor perbankan di Indonesia BUMN atau NON-BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2022 sampai dengan 2024. Sampel penelitian akan ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* melalui beberapa kriteria diantaranya syarat tersebut adalah sebuah perbankan memiliki *Sustainability report*, menyajikan laporan keuangan selama setidaknya tiga tahun berturut-turut selama 2022 sampai dengan 2024, dan secara konsisten terdaftar di BEI hingga tahun 2024. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, karena penelitian ini akan bertujuan untuk menguji adanya pengaruh hubungan antarvariabel melalui data yang bersifat angka. Data sekunder pada penelitian ini akan diperoleh dari laporan keuangan dan laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh masing-masing bank di situs resmi BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2022–2025. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 43 bank komersial yang memenuhi syarat kelengkapan data.

Variabel independen penelitian ini berupa *Sustainability report*, *leverage*, dan *Profitability*. CSR dapat diukur dengan menggunakan *CSR Disclosure Index* berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI) Standards* melalui metode *content analysis*, di mana setiap item pengungkapan diberi skor

1 jika diungkapkan dan 0 jika tidak (Global Reporting Initiative, 2021). Aturan pada POJK No. 51/POJK.03/2017 menjadi acuan untuk meneliti laporan keberlanjutan yang bersifat wajib. Variabel Leverage pada penelitian ini akan dihitung berdasarkan rasio total kewajiban terhadap total aset untuk mengetahui proporsi pendanaan perusahaan melalui utang yang dimiliki dengan segala tingkat risikonya (Armanious & Zhao, 2024a) Sementara perhitungan untuk *Profitability* diukur menggunakan *Return on Assets (ROA)* atau *Return on Equity (ROE)* sebagai indikator kemampuan bank menghasilkan laba dari sumber daya yang dikelola (Ang et al., 2022; Tanin et al., 2024).

Variabel dependen yaitu perhitungan untuk konservatisme akuntansi tersendiri akan diukur menggunakan model *C-Score* sebagai alat ukur yang dikembangkan oleh Khan dan Watts (2009). Pengukuran yang dilakukan melalui sebuah regresi laba yang berimplikasi dengan *return* saham, variabel dummy, serta interaksi antara *return* dan karakteristik perusahaan seperti ukuran (*Size*), *market-to-book ratio (MB)*, *Leverage (Lev)*, dan *Profitability (ROA)*.

Selain itu, penelitian ini menambahkan kepemilikan negara sebagai variabel moderasi untuk menguji apakah bank milik pemerintah memiliki perilaku konservatif yang berbeda dibandingkan bank swasta. Kepemilikan negara dikategorikan sebagai variabel dummy dengan nilai 1 untuk bank BUMN dan 0 untuk bank non-BUMN (Panizza, 2023). Analisis dilakukan menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan pendekatan

regresi data panel untuk menilai interaksi antara kepemilikan negara dan variabel independen terhadap konservatisme akuntansi.

Sebelum menjalankan regresi utama, dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinieritas untuk memastikan validitas model. Selanjutnya dilakukan uji F untuk menilai pengaruh simultan, uji t untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel, serta uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk menilai kekuatan penjelasan model. Seluruh analisis diolah menggunakan perangkat lunak *Eviews*, *Phyton*, dan *Excell*, yang memungkinkan interpretasi hasil secara objektif, terukur, dan reliabel.

Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Pengaruh *Leverage*, *Profitability*, *Sustainability Report* Terhadap Konservatisme Akuntansi dan Kepemilikan Negara Sebagai Moderasi” yang diharapkan bisa memberikan kontribusi empiris dalam literatur mengenai konservatisme akuntansi, khususnya pada industri perbankan di Indonesia, serta memberikan gambaran mengenai sejauh mana praktik *sustainability report*, *leverage*, dan *Profitability* berpengaruh terhadap penerapan prinsip konservatisme dengan mempertimbangkan peran moderasi kepemilikan negara.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada bank

yang terdaftar di periode 2020 sampai dengan 2024?

2. Apakah *Profitability* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada bank yang terdaftar di BEI periode 2020 sampai dengan 2024?
3. Apakah *Sustainability report* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada bank yang terdaftar di BEI periode 2020 sampai dengan 2024?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi yang dimoderasi kepemilikan negara pada bank yang terdaftar di BEI periode 2020 sampai dengan 2024?
5. Apakah *Profitability* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi yang dimoderasi kepemilikan negara pada bank yang terdaftar di BEI periode 2020 sampai dengan 2024?
6. Apakah pengungkapan *Sustainability report* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi yang dimoderasi kepemilikan negara pada bank yang terdaftar di BEI periode 2020 sampai dengan 2024?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap konservatisme akuntansi pada bank yang terdaftar di BEI periode 2020 sampai dengan 2024.
2. Menganalisis pengaruh *Profitability* terhadap konservatisme akuntansi pada bank yang terdaftar di BEI periode 2020 sampai dengan 2024.
3. Menganalisis pengaruh *Sustainability report* terhadap konservatisme akuntansi pada bank yang terdaftar di BEI periode 2020 sampai dengan 2024.

4. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap konservatisme akuntansi yang di moderasi kepemilikan negara pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2020 sampai dengan 2024.
5. Menganalisis pengaruh *Profitability* terhadap konservatisme akuntansi yang di moderasi kepemilikan negara pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2020 sampai dengan 2024.
6. Menganalisis pengaruh *Sustainability report* terhadap konservatisme akuntansi yang di moderasi kepemilikan negara pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2020 sampai dengan 2024.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam aspek teoritis dengan memperkuat pemahaman konservatisme akuntansi melalui perspektif *agency theory*, *signaling theory*, dan teori dimensi budaya. *Agency theory* (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan adanya konservatisme, *leverage*, dan *profitability* diharapkan menjadi mekanisme dalam membatasi adanya perilaku oportunistis, sehingga pengujian C-Score menambah bukti empiris mengenai faktor internal yang memengaruhi kehati-hatian pelaporan. *Signaling theory* (Spence, 1973) menegaskan bahwa *Sustainability Report* menjadi sinyal kualitas tata kelola. Sementara itu, teori budaya Hofstede (1980) menunjukkan bahwa nilai budaya seperti *power distance* dan kolektivisme memengaruhi preferensi konservatif.

Moderasi kepemilikan negara memperkaya pemahaman institusional dalam konservatisme (Hofstede, 1980).

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan**

Penelitian ini membantu menilai pengaruh *Sustainability report*, *leverage*, dan *Profitability* terhadap konservatisme akuntansi di perbankan Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan investasi.

##### **2. Bagi Regulator**

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi OJK dan BEI dalam merumuskan kebijakan terkait pelaporan keberlanjutan, tata kelola, dan transparansi laporan keuangan, khususnya bagi bank dengan kepemilikan negara.

#### **1.4.3 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi studi selanjutnya, serta rujukan bagi mahasiswa dan peneliti di bidang akuntansi maupun rumpun serupa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

##### 2.1.1 Penelitian *Sustainability Report* dan Implikasi Konservatisme Akuntansi Dimoderasi Kepemilikan Negara.

Penelitian terdahulu banyak menunjukkan bahwa kepemilikan negara memiliki sebuah peran penting yang diperlakukan sebagai variabel moderasi, dalam hubungan yang dibangun antara CSR atau dalam penelitian ini disebutkan dengan *sustainability report* dan implikasinya dengan konservatisme akuntansi, hasil penelitian menunjukkan pengaruhnya tidak selalu konsisten. Studi Q1 yang dirilis dalam jurnal di Elsevier oleh Garanina dan Kim (2023), menggunakan *panel regression* pada 258 perusahaan publik di Rusia, menemukan bahwa adanya CSR akan cenderung meningkatkan konservatisme akuntansi. Namun, efek positif tersebut dapat melemah jika diindikasikan pada perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan negara lebih tinggi. Temuan ini sejalan dalam mengindikasikan bahwa kepemilikan negara dapat menurunkan insentif konservatif ketika perusahaan berfokus menonjolkan aktivitas sosialnya (Garanina & Kim, 2023).

Temuan berbeda dalam penelitian yang dilakukan 1.619 observasi perusahaan manufaktur yang ada di Tiongkok, penelitian ini justru menunjukkan hasil berbeda yaitu moderasi kepemilikan negara berpengaruh positif. Dalam konteks yang dibangun tersebut, perusahaan